

## **PEMBAGIAN KERJA INTERNASIONAL YANG BARU SEBAGAI FAKTOR PENGEMBANGKAN WILAYAH**

**Siti Sutriah Nurzaman**

*Kelompok Keahlian Perencanaan Wilayah dan Perdesaan  
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan  
Institut Teknologi Bandung  
Labtek IXA, Gedung PWK Jl Ganesha 10 Bandung Indonesia  
itbpwk@pl.itb.ac.id*

### **Abstract**

*New International Division of Labor theory, introduced by Frobel, Heinrichs and Kreye in 1980, proposed that there is a qualitative shift in the nature of North-South relation in political economy. South is no longer a mere provider of raw material for North industries. Some parts of industrial processes, particularly those labor-oriented and use simple technologies, are relocated to South. It makes South becomes industrialized, although only caused by its cheap labor cost. Regions with abundant supply of cheap and docile labor, good harbor and other infrastructures become the favored location of these industries. As it usually coincides with national metropolis, increased regional inequalities are unavoidable. Due to telecommunication and Internet development, again, there is a qualitative shift in North-South economic relation. Practically all jobs that can be transmitted via Internet or telephone can be done in South who has lower salaries for the same quality work in North. It brings considerable local or regional economic development in some particular South countries.*

**Keywords:** *New International Division of Labor, North-South, regional inequalities.*

## **I. PENDAHULUAN**

Menurut faham teori Ketergantungan (*Dependency*), atau Neo-Marxist, di dunia ini terdapat pembagian kerja. Secara klasik, Karl Marx menyatakan, bahwa dunia terbagi dalam dua lingkup, yaitu lingkup yang memproduksi hasil industri, serta yang memproduksi hasil pertanian (Breathnach, -). Negara berkembang "bertugas" untuk menghasilkan dan mengekspor produksi pertanian dan bahan mentah lainnya. Negara maju, "bertugas" menghasilkan produk industri yang berasal dari hasil pertanian dan bahan mentah tersebut (Heron, 2004). Pembagian kerja seperti ini, disebut sebagai "*Old International Division of Labor*". Mulai pada tahun 1980-an, sebagaimana dipaparkan oleh Frobel et al, terjadi perubahan secara kualitatif di dalam pembagian ini (Heron, 2004). Bagian dari industri yang merupakan proses yang rutin yang dapat dikerjakan oleh tenaga ketrampilan rendah berrelokasi ke negara berkembang. Negara maju memonopoli bagian-bagian yang lebih

sulit seperti manajemen, pemasaran, riset dan pengembangan, serta manufaktur yang lebih maju (Breathnach,-). Jadi, di negara berkembangpun, sudah tumbuh industri, walaupun hanya industri yang sederhana dan dikerjakan oleh tenaga kerja dengan ketrampilan rendah. Pembagian kerja internasional seperti ini, disebut sebagai *New International Division of Labour (NIDL)* atau Pembagian Kerja Internasional yang Baru (PKIB). Dengan PKIB ini, negara berkembang mendapat kemajuan, karena dasar ekonominya, walaupun masih terbatas, mulai bergeser dari sektor pertanian ke sektor industri.

PKIB merupakan internasionalisasi dari modal yang produktif. Modal tidak lagi berkumpul di negara maju, akan tetapi sudah menjalar ke negara berkembang. Adanya PKIB ini memberikan dampak yang cukup besar bagi negara berkembang. Multi National Corporation, atau perusahaan banyak bangsa, yang di Indonesia dikenal sebagai Perusahaan Modal Asing (PMA), mulai berdatangan ke negara berkembang. Industri yang berdatangan ini terutama merupakan industri yang padat karya dan mempergunakan teknologi yang rendah. Karena industri ini padat karya, maka banyak lapangan kerja di sektor industri menjadi terbuka di negara berkembang. Produksi negara negara berkembang pun, naik dengan tajam. Sebagai contoh, karena relokasi industri *Tekstil & Apparel (T & A)*, dari Amerika Serikat ke negara tetangganya, maka impor tekstil Amerika Serikat dari Mexico yang pada tahun 1992 sebesar US\$840 juta, naik menjadi US\$3033 juta pada tahun 1996 dan naik lagi menjadi US\$5187 juta pada tahun 1998. Kenaikan ini setara dengan kenaikan sebesar 517 % dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1998.

Bukan hanya Mexico yang mendapat perkembangan ekonomi yang pesat karena relokasi industri tekstil ini, negara-negara tetangganya yang termasuk cekungan Karibia pun, mendapat kemajuan ekonomi yang sangat pesat. Pada tahun 1987, negara ini mengeksport tekstil sebanyak 436 juta meter persegi ke Amerika Serikat. Pada tahun 1998, eksportnya naik menjadi 3.006 juta meter persegi atau 24 % dari seluruh impor tekstil Amerika Serikat. Kenaikan ini merupakan kenaikan sebesar 603 %. Meksiko sendiri, pada tahun yang sama, eksportnya ke Amerika Serikat naik dari 134 juta meter persegi menjadi 1.985 juta meter persegi atau kenaikan 1381 %. Negara-negara Asia Tenggara (termasuk Indonesia), karena adanya penanaman modal Jepang, pada tahun yang sama mengalami kenaikan ekspor tekstil ke Amerika Serikat dari 547 juta meter persegi menjadi 1.858 juta meter persegi atau kenaikan 240 % (Heron, 2004). Jelas sekali dari data diatas, bahwa PKIB membawa perkembangan positif bagi perkembangan ekonomi negara berkembang

Akan tetapi, mengapa PKIB ini terjadi, bukanlah karena "kemurahan hati" negara maju untuk menolong negara berkembang atau karena usaha dari

negara berkembang. PKIB adalah suatu penemuan dari modal itu sendiri, yang terjadi karena kondisi telah berubah dan yang selalu mencari hasil yang terbaik dari investasinya. Jadi, PKIB juga bukanlah suatu keputusan dari PMA yang timbul begitu saja (Heron, 2004). PKIB tumbuh karena kekuatan modal, dan karena teknologi yang telah berubah. Relokasi industri ke negara berkembang dimungkinkan oleh kemajuan transportasi yang menjadi murah, sehingga memungkinkan industri untuk lebih menguntungkan bila berrelokasi ke tempat dengan buruh yang murah. Tempat buruh yang murah ini adalah negara berkembang.

Dalam perkembangannya, terjadi juga perubahan teknologi yang menyebabkan telekomunikasi menjadi sangat murah serta teknologi informasi yang dapat diakses oleh hampir seluruh negara di dunia melalui internet. Perkembangan ini membawa PKIB ke arah yang secara kualitatif lebih tinggi lagi. Jika pada tahap awal, PKIB mengakibatkan relokasi industri yang padat karya dan berkecakupan rendah, maka selanjutnya, PKIB ini membawa relokasi industri yang lebih berkecakupan tinggi seperti kecakupan komputer, kecakupan berbahasa asing, bahkan memerlukan tenaga kerja setingkat sarjana atau lebih tinggi seperti dokter, akuntan, dsb. Karena kecakupan yang dituntut lebih tinggi, maka dengan sendirinya, upahpun menjadi lebih tinggi (Friedman, 2006). Dengan demikian, nilai tambah yang diterima oleh negara berkembang akan lebih besar lagi. Pada saat ini telah terdapat beberapa negara berkembang yang mendapat limpahan industri semacam ini.

Walaupun disebutkan diatas, bahwa PKIB adalah semata-mata karena inovasi dari modal, akan tetapi, literatur selanjutnya menunjukkan, bahwa negara berkembang pun dapat berupaya, bahkan sering berlomba untuk menarik relokasi dalam rangka PKIB ini (Heron, 2004). Artikel ini membahas, bagaimana bagaimana perkembangan PKIB ini, baik yang tahap awal maupun yang pada tahap selanjutnya. Bagaimana negara berkembang dapat menarik PKIB ini, kritik terhadap PKIB, beberapa kasus dari PKIB baik yang pada tahap awal maupun tahap selanjutnya, serta diakhiri dengan kesimpulan.

## II. PKIB PADA TAHAP AWAL

Teori mengenai PKIB pertama kali dikemukakan oleh Froebel, Heinrichs dan Kreye pada tahun 1980 (Heron, 2004). Froebel et al menyatakan, bahwa pada masa itu, *old division of labour* telah mulai bergeser sehingga hubungan antara *North-South* atau *core-periphery*, tidak lagi lagi sebagai penghasil bahan mentah-industri manufaktur, akan tetapi industri manufaktur telah bergeser ke *periphery*. Hal ini terjadi karena sistem kapitalis sendiri, dimana perusahaan-perusahaan multi nasional mencari laba yang lebih besar karena

persaingan internasional yang lebih sengit. Dalam rangka menaikkan keuntungan ini, perusahaan multinasional, mencari tempat dengan upah buruh yang murah. Bagian dari produksi yang paling sederhana dan tidak rumit, kemudian direlokasi ketempat dengan upah buruh yang murah dan penurut. Maka, jadilah negara *periphery*, atau negara *South*, atau negara berkembang, menjadi tempat relokasi dari industri-industri sejenis ini (Heron, 2004).

Pada . saat Heron menulis artikelnya sendiri mengenai PKIB, Heron telah melihat, bahwa banyak kritik yang dilontarkan pada PKIB ini. Akan tetapi, walaupun secara konsep, mungkin terdapat banyak kritik terhadap PKIB, akan tetapi, kenyataan bahwa terjadi relokasi industri ke negara berkembang, tidak terbantahkan. Hal ini jelas terlihat dalam industri *Textile and Apparel ( T & A industries )* atau industri Tekstil dan pakaian (T & P). Industri T & P ini merupakan industri yang khas dalam PKIB. Banyak negara berkembang yang mendapat "cipratan" PKIB, dengan industri T & P ini. Frobel et al pun, membangun teori PKIB ini dengan mengambil kasus industri T & P di Jerman (Heron, 2004). Walaupun, bagi negara-negara Asia Pasifik, yang mendapat limpahan industri dari Jepang serta negara-negara maju lainnya, industri yang berrelokasi tidak hanya T & P, akan tetapi juga industri elektronik, perakitan kendaraan bermotor, dll (Fuchs and Pernia, 1987).

Bagaimana industri ini berrelokasi, dapat dilihat dari pembahasan Heron mengenai relokasi industri T & P Amerika Serikat ke Meksiko serta negara-negara Karibia. Berlainan dengan teori semula dari Frobel et al, dalam membahas relokasi ini, Heron mengemukakan, bahwa relokasi industri T & P dari Amerika Serikat bukan semata-mata karena upah buruh yang murah. Relokasi dari industri T & P Amerika Serikat menurut Heron, disebabkan oleh ekonomi politik dari negara-negara maju. Dengan telah mulainya relokasi industri T & P dari negara negara maju di luar Amerika Serikat ke negara berkembang, Amerika Serikat merasa kewalahan dengan persaingan industri T & P dari negara berkembang. Oleh sebab itu, untuk melindungi industri T & P dalam negerinya, Amerika Serikat mengajukan perjanjian *Multi Fibre Arrangement (MFA)* dengan negara-negara berkembang, yang berlaku dari tahun 1974 s.d. 1995. Tujuan dari MFA ini adalah membuat sistem kuota yang lebih "teratur", atau kuota ekspor industri T & A ke negara Barat sedikit-demi sedikit ditambah. Akan tetapi kenyataannya, negara Barat makin lama makin restriktif terhadap impor dari negara berkembang. Keadaan ini ternyata memberikan hasil yang diluar dugaan negara maju. Dengan makin restriktifnya impor, negara berkembang makin mengembangkan kemampuan industri T & P-nya sehingga negara-negara berkembang, terutama yang tidak menandatangani persetujuan MFA makin mampu bersaing memasuki pasar

Amerika Serikat. Jadi, akibat proteksi negara maju, industri T & P justru berkembang menjadi industri yang terglobalisasi (Heron, 2004).

Dengan melihat kenyataan ini, maka Amerika Serikat melakukan strategi lain, yaitu dengan strategi "*if-you-can't-beat-them-join-them*". Jadi, sekarang, industri-industri T & P Amerika Serikat mengadakan "*outward processing*" (memproses di luar negeri) atau "*production sharing*" (bagi hasil) dengan negara-negara berkembang yang ongkos buruhnya murah. yang bertetangga. Jadi, negara maju, menyusun aturan perpajakannya sedemikian rupa sehingga mendorong perusahaan-perusahaan lokalnya mengadakan *outsourcing* atau mengontrakan dengan cara relokasi beberapa bagian dari proses produksinya (biasanya bagian *assembling*) ke negara berkembang dengan upah buruh murah yang bertetangga. Negara berkembang inipun, berusaha menarik industri ke negaranya dengan memberikan berbagai kebijakan fiskal seperti pembebasan pajak (*tax holiday*) dan lain-lain. Dengan cara ini diharapkan, Amerika Serikat dan negara-negara Barat dapat bersaing dengan impor langsung dari negara-negara berupah buruh rendah di bagian dunia yang lain, misalnya Asia Timur dan Asia Tenggara. Disamping itu, juga dengan cara ini, Amerika meng-klaim. bahwa mereka telah memberikan kepada negara tetangganya, investasi asing (PMA), penciptaan lapangan kerja, serta sampai ke suatu tingkat tertentu, alih teknologi. Terlepas dari apakah pengakuan mereka ini betul atau tidak, tetapi buktinya, dengan cara ini, mereka telah mengembangkan industri T & P ini menjadi industri yang terglobalisasi, khususnya ke negara-negara berkembang sekitar Amerika Serikat, yaitu Meksiko dan negara-negara Karibia (Heron, 2004). Meksiko merupakan negara yang mendapat perlakuan khusus dalam relokasi ini, karena keanggotaan Meksiko dalam NAFTA (Heron, 2004). Pengaruh dari relokasi industri ini terhadap perkembangan industri T & P Meksiko dan negara-negara Karibia, telah diuraikan dalam tulisan ini dimuka.

Jika Amerika Serikat merelokasi industri T & P-nya ke Meksiko dan negara-negara Karibia, maka negara-negara berkembang di Asia Pasifik mendapat relokasi industri terutama dari Jepang. Sebelum dan selama Perang Dunia ke II, investasi Jepang sebetulnya telah banyak yang dilakukan di luar negeri. Investasi ini terutama berlokasi di negara jajahan Jepang, yaitu Manchukuo (Mansyuria), Formosa (Taiwan), serta di Korea. Sesudah perang dunia II, Jepang sibuk dengan rekonstruksi negaranya sendiri, sehingga praktis tidak ada investasi asing dari Jepang. Baru pada akhir tahun 1960-an, industri di Jepang mulai melebarkan sayapnya ke negara lain, terutama karena lapangan kerja penuh (*full-employment*) telah tercapai pada awal tahun 1960-an, nilai yen yang telah naik, banyaknya tenaga manajer, mulai terasa berkurangnya tenaga kerja serta sumber daya alam dalam negeri serta dorongan dari

pemerintah Jepang untuk merelokasi industrinya ke luar Jepang, terutama industri yang merusak lingkungan (Fuchs and Pernia, 1987).

Investasi Jepang di luar negeri berkembang dengan pesat pada tahun 1970-an, walaupun demikian masih jauh kalah dari investasi Amerika Serikat. Investasi Jepang dari tahun 1951 s.d. tahun 1981 ditandai dengan proporsi yang besar ke negara berkembang (sekitar 56,5 % dari seluruh investasinya). Lebih kurang dua kali lipat dari proporsi investasi Amerika di luar negeri. Sekitar 28,6 % dari investasinya jatuh ke negara Asia, diantaranya 15,1 % jatuh ke Indonesia. Berbeda dengan investasi negara maju lainnya, investasi Jepang lebih bervariasi dalam sektor industrinya. Jika negara maju terutama berinvestasi dalam industri T & P, Jepang berinvestasi juga dalam industri ekstraktif, jasa dan perdagangan. Akan tetapi, kecenderungannya, investasi Jepang pun mengarah pada industri manufakturing yang padat karya seperti tekstil dan elektronika serta assembling kendaraan bermotor.. Jadi relokasi investasi Jepang pun, dengan demikian bergerak pada relokasi industri berpola PKIB (Fuchs and Pernia, 1987).

Bahwa industri Jepang bergerak ke pola relokasi PKIB, dapat dilihat dari data, bahwa pada tahun 1984, industri padat karya tekstil, memegang proporsi sebesar 38 % dari seluruh investasi Jepang di Asia (negara berkembang). Industri yang memegang peran kedua dalam investasi Jepang di Asia adalah industri alat-alat listrik yang juga padat karya, disusul oleh beragam industri lainnya yang juga padat karya. Semua industri di atas, adalah industri yang tumbuh dengan baik di Asia. Khusus bagi Indonesia, menurut data pada tahun 1978 Indonesia menempati peringkat kedua dalam besarnya investasi Jepang di Asia Pasifik sebesar US\$ 129,3 juta, kedua setelah Taiwan yang menduduki peringkat pertama dengan total investasi sebesar US\$ 592,3 juta. Lokasi dari investasi Jepang di Indonesia ini kebanyakan berada di pusat metropolitan, dan hanya sebagian kecil yang berada di pusat wilayah dan di *rural periphery* (Fuchs and Pernia, 1987). Keadaan ini berbeda dengan di Malaysia. Proporsi investasi yang berada di pusat wilayah (*regional centers*) jauh lebih besar daripada Indonesia, sehingga investasi lebih menyebar secara merata. Hal ini terjadi, karena Malaysia sudah sejak awal mempromosikan industri-industri pertanian *off-farm* serta industri yang berdasarkan sumber daya alam (Fuchs and Pernia, 1987). Jadi, kebijakan awal dari pemerintah, dapat mempengaruhi lokasi investasi asing

Semua relokasi industri dari negara maju ke negara berkembang dalam rangka teori PKIB ini, merupakan bagian dari globalisasi dunia. Dunia yang telah menjadi kabur batas-batasnya sehingga merupakan kesatuan ekonomi. Salah satu dampak dari PKIB dan globalisasi ini adalah munculnya negara-negara industri baru di Asia. Negara ini dengan cepat berkembang dari negara

yang tergolong sebagai negara berkembang, menjadi negara industri baru. Negara industri baru ini mempunyai ciri-ciri sebagai negara industri yang maju, yang ditandai oleh angka PDB dan PDB perkapita yang tinggi, barang konsumsi yang sama dengan negara industri yang telah maju, dan sebagainya. Negara ini disebut sebagai *New Industrialized Countries* atau NICs. Negara yang termasuk kedalam NICs ini adalah Singapura, Hongkong, Taiwan serta Korea Selatan. Selain dari negara NICs ini, juga terdapat yang disebut sebagai negara *nearNICs* yaitu negara yang hampir menjadi negara industri baru. Termasuk kedalam negara ini adalah Thailand, Malaysia, Indonesia, Filipina yang semua berada di Asia Tenggara, serta mungkin juga Cina.

Selain itu, sebagai akibat globalisasi serta PKIB ini, maka kaitan didalam negara menjadi longgar. Dengan demikian, tidaklah mengherankan, apabila dua wilayah atau lebih dari dua atau lebih negara yang berlainan, dapat membentuk suatu wilayah baru yang merupakan satu kesatuan ekonomi. Contohnya adalah bersatunya secara ekonomi menjadi suatu wilayah pertumbuhan baru antara Hong Kong (waktu itu masih koloni Inggris) dengan Cina selatan (Shenzhen, Zuhai, Guangzhou dan Amoy) yang merupakan bagian dari RRC. Wilayah/kota di Cina Selatan ini setelah secara ekonomi bersatu dengan Hongkong tumbuh dengan pesat sekali, seperti yang dinyatakan dalam PDRB perkapitanya. Hong Kong sebagai "induk" dari kerjasama ini mempunyai PDB perkapita sebesar US\$ 12.000, suatu angka yang sangat kontras dengan PDB perkapita Cina yang hanya US\$ 319. Akan tetapi Shenzhen sebagai kota yang terdekat dengan Hongkong, mempunyai PDRB perkapita sebesar US\$ 5.695, Zuhai mempunyai PDRB perkapita US\$ 2.033, Amoy, US\$ 1.730 dan Guangzhou US\$ 1.510. Terlihat sekali bedanya dengan Cina secara keseluruhan (Ohmae, 1995).

Contoh lain adalah yang mencakup wilayah Indonesia sendiri, yaitu segitiga pertumbuhan Sijori, yaitu Singapura, Johor (Malaysia) serta Riau di Indonesia (Ohmae, 1995). Sijori terbentuk karena Singapura, yang merupakan *nodal center* dari Sijori ini, sudah terlalu mahal untuk lokasi industri, baik dilihat dari sudut upah pekerja, maupun dari sudut harga lahan. Johor merupakan wilayah dengan harga lahan yang tidak terlalu mahal dan tenaga kerja semi terlatih. Riau yang dalam hal ini diwakili oleh P. Batam mempunyai lahan dan tenaga kerja dengan ketrampilan dan upah yang rendah. Ketiga wilayah tersebut secara geografis sangat berdekatan. Keadaan ini menjadi sesuatu yang komplementer sehingga pembentukan segitiga pertumbuhan Sijori ini menjadi sangat menguntungkan. Industri yang biasanya berlokasi di Singapura dapat "ditarik" untuk berlokasi di Johor atau di Riau dengan memanfaatkan kedekatannya dengan Singapura. Hal ini terbukti, dari naiknya investasi di Batam secara sangat tajam dari sekitar Rp 17 milyar pada tahun 1980 menjadi lebih dari Rp 353 milyar pada tahun 1990.

Jenis industrinyapun beragam, mulai dari industri kimia, besi dan baja, minyak, sampai *real estate* dan bangunan serta pariwisata. Negara yang menanam investasi di Batam pun beragam. Investasi terbesar dipegang oleh Singapura yang pada tahun 1990 secara kumulatif telah menanam lebih dari US\$ 299 juta, disusul oleh Amerika Serikat yang pada tahun yang sama telah menanam US\$ 172 juta, kemudian Hong Kong sebesar US\$ 14,5 juta, dan disusul oleh negara lainnya seperti Jepang dan negeri Belanda (Lee Tsao Yuan, 1991). Sayangnya, setelah krisis ekonomi dan berlakunya Undang-Undang Otonomi daerah, perkembangan Batam ini menurun karena adanya kerancuan dan ketidak-konsistenan dalam pengelolaan Batam (Muladi et al, 2003; majalah Tempo, 2006). Walaupun demikian, pemerintah Indonesia mencoba membangkitkan kembali perkembangan Batam dengan menjalin kerjasama dengan pemerintah Singapura (Majalah Tempo, 2006; Harian Kompas, 2006).

Mengapa negara-negara Asia ini mencapai keberhasilan yang tinggi di dalam pertumbuhan ekonominya, tidak terlepas dari peran negara. Walaupun Frobel menyatakan, bahwa PKIB tidaklah disebabkan oleh kebijakan tertentu dari perusahaan multinasional atau dari negara, baik negara maju maupun negara berkembang (Heron, 2004), bukti empiris memperlihatkan, bahwa negara juga berpengaruh terhadap kemampuan untuk menangkap investasi dalam PKIB.

Semua negara Asia yang berkembang dengan cepat tersebut boleh dikatakan menganut paham kapitalisme. Perkembangan negara disandarkan pada kekuatan-kekuatan modal. Dalam negara yang seperti ini, terdapat dua variant dari negara, yaitu negara yang menganut *regulatory state* serta yang menganut *development state*. Negara *development state* mempunyai ciri, bahwa dasar rasionalitas dari negara tersebut adalah perencanaan (*plan-rational*), fokus dari pengukuran keberhasilan adalah *outcome* (hasil). Tujuan utama dari negara adalah perkembangan (*development*). Kriteria keberhasilan adalah dari keefektifan. Di negara ini, juga terdapat suatu kebijaksanaan industri yang eksplisit, syarat (*prerequisite*) untuk keberhasilan adalah adanya konsensus nasional, negara lebih dapat mengatasi persoalan-persoalan rutin yang terjadi, keputusan diambil oleh para elit birokrasi, pemain utama dari negara adalah kaum nasionalis serta birokrat. Negara yang dapat dijadikan contoh dari varian ini adalah Jepang. Keberhasilan pembangunan Jepang, kemudian ditiru oleh negara-negara lainnya di Asia, sehingga boleh dikatakan, hampir semua negara Asia merupakan *development state*. Indonesia di jaman Presiden Soeharto pun, terlihat memiliki ciri-ciri *development state* seperti diatas. Salah satu cirinya adalah, adanya kebijaksanaan industri yang sangat eksplisit. Keberhasilan pembangunan, diukur dari keberhasilan industrialisasi. Kebijakan industrialisasi di negara-negara Asia, adalah *export-led industrialization* (ELI) yang memanfaatkan teori PKIB dengan sebaik-baiknya (Wang, 1999). Dengan

kebijaksanaan seperti diatas, maka tidaklah mengherankan, apabila negara-negara Asia (termasuk Indonesia), berusaha menarik investasi asing sebanyak-banyaknya, Investasi mau datang, apabila terdapat pelabuhan, jalan, listrik, dan prasarana lain yang baik, serta adanya tenaga kerja yang murah dan penurut (Fuchs and Pernia, 1987). Sumber dana untuk pembangunan tersebut, sebagian besar dari pinjaman luar negeri. Dengan demikian, tidaklah mengherankan, apabila negara-negara Asia ini merupakan negara-negara yang terglobalisasi, dalam arti, nilai perdagangan (baik impor maupun ekspor) tinggi, serta pinjaman luar negeri yang tinggi pula. Upah buruh pun ditekan, dengan menekan harga beras dan bahan makanan lainnya, seperti yang dilakukan Indonesia dengan Bulog-nya. Ternyata, dengan strategi ini, banyak negara Asia yang berkembang dengan pesat, yang dinyatakan oleh banyaknya negara-negara NICs dan near NICs (Wang, 1999). Akan tetapi karena negara-negara ini sangat terbuka, maka negara ini juga sangat rentan terhadap pengaruh luar. Hal ini terjadi pada krisis pada tahun 1997. Negara-negara Asia yang terkena dampak krisis paling parah, adalah negara-negara yang pinjaman luar negerinya paling banyak (Wang, 1999).

Dengan melihat pengalaman Asia seperti di atas, Wang mempertanyakan, apakah prinsip *development state* harus diubah? Pertanyaan ini, walaupun secara sekilas, dijawab sendiri oleh Wang, bahwa *development state* tidaklah usah dihapus, akan tetapi harus terdapat reformasi dalam *development state* ini. Dalam politik, demokrasi harus dikonsolidasikan lagi. Juga, pertumbuhan yang selama ini "*single minded*" hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi sehingga lingkungan menjadi rusak, harus direformasi. Caranya adalah dengan memberikan kriteria perkembangan yang benar, yaitu adanya keseimbangan antara pertumbuhan dengan keterlanjutan, ekspansi secara kuantitatif dengan perbaikan kualitatif, keseimbangan antara produksi dan konsumsi atau kesejahteraan, pasar luar negeri yang seimbang dengan pasar dalam negeri. Atau singkatnya, perkembangan dalam demokrasi harus diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan bukannya pada ekspansi yang bersifat kuantitatif (Wang, 1999)

Jadi, PKIB yang menghasilkan perkembangan yang cepat di negara Asia dan kemudian juga kehancuran yang cepat, haruslah sekarang ditanggapi dengan cara yang sebaik-baiknya.

### **III. PKIB PADA TAHAP SELANJUTNYA**

Pada tahap selanjutnya, ternyata PKIB mengalami lagi peningkatan kualitas. Dari *Old International Division of Labor* beralih menjadi *New International Division of Labor* (NIDL -PKIB) karena dalam industri terdapat bagian-bagian yang dapat dikerjakan oleh pekerja yang kurang trampil dan berupah

rendah. Karena kemajuan teknologi, bagian-bagian ini dapat dipisahkan dari proses produksi keseluruhan dan direlokasi ke negara berkembang yang mempunyai upah buruh rendah. Sebagaimana diuraikan diatas, ini adalah PKIB pada tahap awal. Selanjutnya, karena kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi sudah berkembang sedemikian jauhnya, sehingga ongkos telekomunikasi dapat ditekan sampai kecil sekali (Breathnach,-). Penggunaan internet, menyebabkan bahwa data dalam arti yang seluas-luasnya, dapat diakses dari lokasi manapun di seluruh dunia, sepanjang lokasi tersebut tersambung dengan jaringan telekomunikasi. Hal ini menyebabkan, bahwa data dapat diakses oleh suatu lokasi, diproses, dan kemudian dikirim lagi ke sumber data dalam waktu *real-time*. Dengan demikian, dunia menjadi betul-betul terglobalisasi. Tidak ada lagi jarak yang dapat menghalangi mengalirnya informasi. Dengan teknologi semacam ini, maka mungkin saja, suatu data yang harus diolah di suatu negara maju, yang upah pengolahannya sangat tinggi, dialirkan melalui internet ke negara berkembang, kemudian diolah di negara berkembang tersebut (dengan upah yang lebih rendah), dan sesudah itu, dialirkan kembali ke negara maju dalam waktu *real time*.

Walaupun upah di negara berkembang ini lebih rendah daripada pekerjaan yang sama di negara maju, akan tetapi, pekerjaan yang direlokasi, bukanlah pekerjaan tingkat rendah. Pekerjaan akuntansi, informatika seperti penyusunan program atau *soft ware* yang lain, dokter, dan sarjana lainnya merupakan bagian-bagian dari pekerjaan relokasi ini (Friedman, 2006). Bahkan, pekerjaan *back office* seperti tata usaha, pembukuan, dsb yang kurang bergengsi dibandingkan dengan pekerjaan sarjana seperti tersebut diatas, dengan gaji yang relatif murah bagi negara maju, akan tetapi sangat memberi jaminan hidup yang layak bagi standar negara berkembang, dapat merupakan pekerjaan yang bergengsi. Sudah pasti pekerjaan tersebut bergengsi dan berupah sangat layak, apabila pekerjaan tersebut dilakukan untuk negara maju melalui jaringan telekomunikasi (telpon SLJJ atau internet) yang *real time* seperti diatas. Ini adalah PKIB pada tahap yang lebih lanjut. Jadi, pekerjaan yang berelokasi, sudah merupakan pekerjaan yang lebih tinggi kualitasnya, dan juga merupakan pekerjaan yang mempunyai tingkat upah yang lebih tinggi. Jadi dengan PKIB ini, dengan demikian, dapat saja di negara berkembang terdapat segolongan masyarakat yang mempunyai pekerjaan yang gengsinya sama dengan pekerjaan di negara maju (walaupun dengan upah yang lebih rendah daripada negara maju).

Berkaitan dengan itu, tidak salah apabila Breathnach mengutip Hoogvelt, menyatakan bahwa dengan pembagian kerja secara global, maka di *periphery* pun mungkin saja terdapat ciri-ciri dari suatu *core*, dan di *core* pun, mungkin saja terdapat ciri-ciri yang biasa terdapat di *periphery*. Hubungan *core-periphery* sudah menjadi hubungan sosial dan bukan hubungan geografis

lagi. Lebih jauh Breathnach mengutip Atkinson yang menyatakan, istilah *core-periphery* sekarang lebih banyak dikaitkan dengan pada tipe apa seseorang bekerja. *Core* dikaitkan dengan pekerjaan upah tinggi yang terjamin, biasanya penuh waktu dan merupakan pekerjaan terlatih/terdidik, sedangkan *periphery* dikaitkan dengan pekerjaan upah rendah, tak terjamin, biasanya merupakan pekerjaan temporer dan paruh waktu serta merupakan pekerjaan tak terlatih/terdidik (Breathnach, 2006).

Bagaimana PKIB ini terjadi, dapat dilihat pada contoh di India, atau tepatnya di Bangalore, India Selatan. Di *downton* Bangalore terdapat sebuah lapangan golf yang luas dan modern. Sekeliling lapangan golf tersebut berdiri kantor-kantor atau lebih tepatnya bangunan-bangunan tinggi modern penuh baja dan kaca dari IBM, Microsoft, Goldman Sach, Hewlett Packard dan Texas Instrument. Penanda *tee* lapang golf berlambang printer Epson, para *caddy* memakai topi berlambang 3M. Di jalan di kompleks ini, berseliweran insinyur-insinyur baik wanita atau pria dengan di dadanya terpampang tanda pengenalan. Tanda pengenalan ini berlambang perusahaan perusahaan internasional yang tadi. Insinyur-insinyur ini bukan insinyur-insinyur orang kulit putih walau mereka berbicara bahasa Inggris yang sering beraksen Amerika. Mereka orang India asli dan ini bukan di California, tetapi di Bangalore, silicon valley-nya India!- Walaupun di jalan di luar kompleks terlihat papan iklan Pizza Hut yang besar dengan tulisan "Gigabites of Tate", ini tetap India. Kontras dengan keadaan tersebut, disinipun terdapat jalan yang berlobang, dengan sapi yang dianggap suci berkeliaran di jalan, pedati ditarik kuda dan supir kendaraan umum yang tanpa sepatu (Friedman, 2006).

Lalu aktifitas apa saja yang ada disini? Pekerja perusahaan multinasional tersebut sudah tentu bekerja mengerjakan tugas-tugas usaha multinasional seperti biasa. Akan tetapi, apabila kita pergi ke tempat sekitar 40 menit dari sini, maka ditemukan kampus Infosys Technologies Limited, suatu perusahaan India asli. Di kampus ini berrtebaran gedung-gedung kaca modern yang dapat dikatakan muncul bagaikan jamur tiap minggu. Disini terdapat kolam renang, lapang golf, restoran dan kantin. Di gedung-gedung ini, ratusan ribu orang India bekerja. Sebagain mengerjakan program *software* untuk perusahaan-perusahaan Amerika dan Eropa. Sebagian merupakan kantor belakang (*back-office*) bagi berbagai perusahaan Amerika dan Eropa juga. Yang dilakukan oleh kantor belakang itu juga bermacam-macam. Mulai dari pemeliharaan komputer, sampai melayani kehilangan barang dari suatu perusahaan penerbangan. Pemeliharaan komputer misalnya dari IBM, khusus melayani panggilan telpon yang bertanya jika ada kesukaran dalam memakai komputer IBM. Kadang-kadang jawabannya sederhana sekali: "Silakan pijit tombol ini dan itu, lalu tekan Enter". Pernah suatu kali, jawaban sedemikian rumit sehingga waktu konsultasi sampai mencapai 11 jam! Dengan ditemani

masing-masing sebuah komputer yang menyimpan data bagasi suatu perusahaan penerbangan, puluhan gadis dan pria India menyelesaikan masalah kalau ada seorang penumpang kehilangan bagasinya dalam suatu penerbangan. Puluhan kantor belakang dari perusahaan-perusahaan Amerika dan Eropa berada dalam naungan Infosys Technologies ini (Friedman, 2006).

Perusahaan India yang lain, MphasiS mengerjakan pekerjaan akuntansi dari perusahaan-perusahaan, badan-badan pemerintah serta perorangan Amerika. Perusahaan akuntan Amerika, mengirim datanya ke MphasiS, dengan data tersebut dibuat perhitungan pajak penghasilan dari klien perusahaan Amerika tersebut, dan langsung hasilnya dikirim kembali ke perusahaan Amerika tersebut. Pada tahun 2003, ada sekitar 25.000 pajak penghasilan badan/orang Amerika yang dikerjakan di India. Pada tahun 2004 jumlah ini naik menjadi 100.000. Pada tahun 2005 telah naik lagi menjadi 400.000 (Friedman, 2006).

Yang lebih hebat lagi, analisa radiologipun dapat dikerjakan di India. Dokter radiologi Amerika mengirimkan foto dalam bentuk digital ke India, kemudian setelah dibaca dan dianalisa radiolog India, langsung hasilnya dikirim ke Amerika. Sangat cepat dan murah. Perbedaan waktu, juga merupakan hal yang menguntungkan bagi India. Untuk pekerjaan yang harus cepat selesai, misalnya menyiapkan presentasi analisis perkembangan perusahaan, seorang manajer Amerika dapat mengirimkannya sore hari waktu Amerika yang diterima pagi hari waktu India, dikerjakan siangya, dikirim lagi ke Amerika langsung sore itu waktu India, pagi waktu Amerika, siap untuk dipresentasikan. Sebaliknya, bagi pekerja kantor belakang serta *call center*, untuk menyesuaikan waktu dengan Amerika Serikat, mereka bekerja malam. Pulang bekerja, mereka tidur sebentar, kemudian pergi kuliah. Selesai kuliah, mereka tidur lagi sebentar, kemudian mereka bekerja malam hari. Dengan demikian, sambil bekerja mereka dapat kuliah untuk meningkatkan pendidikan dan mencari kemungkinan pekerjaan yang lebih baik. Dengan pekerjaan yang sekarang saja, mereka mendapat gaji, sekitar US\$ 500 untuk pemula dan US\$ 700 bagi yang sudah berpengalaman, sudah termasuk makan selama bekerja, transportasi dan asuransi. Dengan gaji sebesar itu, mereka sudah dapat hidup mewah, mempunyai mobil, tinggal di apartemen dan dapat membayar uang kuliah. Padahal, gaji sebesar itu, sangat rendah kalau dibandingkan dengan standar gaji Amerika. Kalau mereka mendjadi sarjana dan mendapat pekerjaan yang lebih baik, mereka mendapat gaji lebih dari dua kali lipat. Suatu gaji yang sangat bagus untuk standar India, akan tetapi sangat rendah untuk standar Amerika Serikat (Friedman, 2006). Jadi disini dapat dilihat bahwa PKIB gaya baru ini, dapat memberikan taraf penghidupan yang sangat baik bagi negara berkembang, demikian juga bagi perusahaan-perusahaan multi nasional yang sebagian pekerjaannya berelokasi ke negara berkembang, dapat menghemat ongkos pekerja dengan sangat besar. Hal ini

berbeda dengan PKIB gaya lama, yang hanya dapat memberikan pekerjaan yang berpenghasilan rendah seperti buruh pabrik, dsb.

Untuk semua itu, sudah tentu usaha yang dilakukan juga harus lebih banyak. Bagi para pekerja, mereka harus dapat berbahasa Inggris atau bahasa asing lainnya dengan sangat baik. Sering terjadi, bahwa perusahaan melatih calon pekerja berbicara bahasa Inggris dengan aksen Amerika, aksen Inggris, atau bahasa asing lainnya, sesuai dengan negara yang mereka layani. Bahkan, kadang-kadang, nama merekapun diganti dengan nama Amerika, hanya untuk membuat para langganan Amerika mereka, merasa "comfortable". Sedemikian baiknya mereka menyesuaikan diri dengan budaya Amerika, sehingga pelanggan Amerika tidak sadar, bahwa mereka dilayani oleh orang India yang berada ribuan kilometer jauhnya dari tempat mereka tinggal. Selain itu, mereka juga harus lancar bekerja dengan komputer serta ilmu yang lain, sesuai dengan tuntutan pekerjaan mereka. Disamping ketrampilan yang merupakan piranti lunak seperti itu, syarat piranti kerasnyapun cukup tinggi. Lokasi ini harus tersambung dengan jaringan telekomunikasi serta jaringan internet internasional yang murah, harus tersedia lingkungan hidup seperti kawasan perkantoran, kawasan perumahan, dsb yang menyenangkan untuk dapat menarik investor kemari, juga untuk menarik pekerja kelas kerah putih betah untuk tinggal dan bekerja (Friedman, 2006).

Selain India, salah satu negara yang juga sudah berhasil "menangkap" PKIB gaya baru ini adalah Cina. Kota Dailan di Cina sebelah utara, suasana nya juga hampir sama dengan Bangalore di India. Jalan jalan serta boulevard yang lebar, membentang membelah kota. Kantor-kantor perusahaan- perusahaan komputer dunia yang serba modern menghiasi kota, seperti juga lapangan golf dan kemewahan lainnya yang tersedia bagi pekerja serta tamu dari kantor-kantor tersebut.. Pokoknya, jika Bangalore adalah silicon valley-nya India, maka Dailan adalah silicon valley-nya Cina. Ada satu keistimewaan lainnya dari Dailan, yaitu, jika di Bangalore cabang-cabang perusahaan komputer yang ada adalah cabang-cabang perusahaan komputer Amerika Serikat, maka di Dailan, juga terdapat banyak sekali cabang perusahaan komputer Jepang. Juga, karena kedekatannya dengan Jepang, maka banyak sekali aktifitas kantor belakang Jepang yang berlokasi di sini. Dengan demikian, bahasa Jepang menjadi bahasa favorit lainnya selain dari bahasa Inggris untuk dipelajari oleh para siswa Jepang. Padahal, trauma kejayaan Jepang selama P.D. II masih kuat di Cina. Akan tetapi, di Dailan, terlihat mereka menutup mata akan hal ini. (Friedman, 2006; Ohmae, 1995).

Selain India dan Cina, negara-negara Asia yang lainpun, seperti Malaysia (diwakili oleh Penang) terlihat juga sudah mulai "menangkap" PKIB tahap selanjutnya ini (Ohmae, 1995). Kalau melihat kecenderungan penggunaan

internet yang makin tinggi, (Harian Kompas, 2006), maka besar kemungkinan Vietnam pun akan segera mengikuti jejak pendahulunya.

Gejala PKIB ini, ternyata tidak hanya terjadi di negara berkembang, negara Eropa pun, banyak yang terkena oleh gejala PKIB ini. Sebagai contoh adalah Irlandia. Pada abad ke 19, ekonomi Irlandia adalah ekonomi agraris sebagai penyeimbang dari ekonomi Inggris yang merupakan ekonomi industri. Adanya perjanjian perdagangan bebas antara Inggris dan Irlandia sesudah tahun 1800 memperkuat hal ini. Karena kemiskinan, banyak penduduk yang bermigrasi baik ke Amerika Serikat maupun Inggris. Penduduk yang kemudian dikenal sebagai Republik Irlandia Irlandia yang pada tahun 1841 berjumlah 6,5 juta jiwa, menurun jumlahnya sehingga seabad kemudian menjadi tinggal setengahnya. Dublin merupakan kota primate. Ketika pada tahun 1922 Irlandia mendapat kemerdekaan dan terpecah menjadi dua negara (Irlandia Utara dengan ibukota Belfast dan Irlandia Selatan atau Republik Irlandia dengan ibukota Dublin), penduduk Dublin mencapai 0,5 juta jiwa dari 3 juta jiwa penduduk Republik Irlandia. Mulai pada tahun 1930 Irlandia menggalakan industrialisasi dengan memberi proteksi untuk industri-industri substitusi impor. Hal ini menyebabkan perkembangan industri Irlandia melijit, akan tetapi kemudian mencapai stagnasi karena sempitnya pasar dalam negeri. Setelah Irlandia bergabung dengan European Economic Community (sekarang European Union), Irlandia menjadi menarik bagi industri-industri padat karya yang memerlukan ongkos buruh yang murah. Banyak perusahaan industri Amerika Serikat yang berrelokasi kemari karena upah buruh yang murah dan kesamaan bahasa dan budaya (ingat migrasi orang Irlandia ke Amerika Serikat). Industri ini dibangun untuk melayani pasar Eropa. Jadi, ini merupakan gejala PKIB tahap awal.

Mulai tahun 1990, ternyata ekonomi Irlandia berubah total. Irlandia dijuluki sebagai macan ekonomi Eropa. PDB perkapita yang pada tahun 1980 hanya 60 % dari rata-rata Uni Eropa, pada tahun 1996, telah menjadi 94% dari rata-rata PDB perkapita Uni Eropa. Hal ini terjadi karena rendahnya angka inflasi, adanya *boom* pariwisata, akan tetapi yang terpenting adalah adanya relokasi industri yang berbeda dari sebelumnya. Karena kemajuan teknologi telekomunikasi, industri yang berrelokasi ke Irlandia adalah industri yang kandungan teknologinya lebih tinggi, seperti industri komputer dari IBM, Hewlett Packard, 3COM, yang sarat dengan teknologi. Industri ini membutuhkan tenaga sarjana-sarjana Irlandia. Disamping itu, juga seperti India, industri kantor belakang dan *call center* berkembang dengan pesat. Hal ini diuntungkan oleh bahasa Inggris yang merupakan bahasa orang Irlandia. Akan tetapi, dibandingkan dengan India, perkembangan pekerjaan ini tidak sespektakuler India. Apabila di India pekerjaan ini dapat memberikan lapangan kerja sampai pada angka ratusan ribu, di Irlandia pekerjaan-

pekerjaan ini hanya dapat memberi lapangan kerja sampai puluhan ribu orang saja. Itupun, sekarang mereka sudah khawatir, bahwa lapangan kerja ini akan menurun, dengan adanya saingan dari negara-negara Eropa Timur yang mempunyai tenaga kerja yang lebih murah dari Irlandia (Breathnach,2006). Akan tetapi, seperti telah terlihat, dengan pembukaan lapangan kerja yang hanya puluhan ribu itu saja, ekonomi Irlandia telah "terdongkrak" sedemikian tinggi.

#### IV. KESIMPULAN

Uraian di atas memberikan kesimpulan, bahwa PKIB, yang walaupun oleh para penganut aliran Dependensi dianggap sebagai cara baru dari negara-negara kapitalis untuk mengambil keuntungan dari negara-negara berkembang yang berupah buruh rendah, dapat meningkatkan ekonomi dari negara-negara berkembang. Dalam PKIB pada tahap awal, kenaikan ekonomi ini didapat dengan berrelokasinya industri-industri padat karya yang memerlukan buruh dengan ketrampilan rendah. Dengan demikian, walau hal ini bagi negara berkembang sangat menolong ekonominya, kenaikan nilai tambahnya terbatas. Industri ini, biasanya berlokasi di tempat-tempat yang mempunyai pelabuhan yang baik serta prasarana ( listrik, air, jaringan jalan, dsb ) yang bagus. Oleh karena itu, industri ini berkumpul di wilayah-wilayah yang sudah maju (*core region*) dari suatu negara. Akibatnya, PKIB ini sering mempertajam kesenjangan wilayah dari negara tersebut. Selain dari pada itu, kreana industri ini merupakan industri yang kebanyakan merupakan industri assembling yang *footlose*, maka industri ini dapat dengan cepat berrelokasi lagi ke negara lain yang lebih menguntungkan, misalnya, terdapatnya keamanan yang lebih baik, kestabilan ekonomi dan politik, serta adanya buruh yang lebih murah dan lebih penurut.

PKIB tahap selanjutnya, karena kualitas industrinya lebih tinggi, memberikan dampak ekonomi yang juga lebih tinggi. Akan tetapi, persyaratan lokasinya juga lebih tinggi. Selain dari prasarana telekomunikasi yang harus sangat baik dan murah, juga hubungan internet yang cepat dan murah merupakan syarat utama. Syarat lain adalah lokasinya harus memberikan kenyamanan yang tinggi bagi pekerja-pekerja berkerah putih. Dilihat dari piranti lunaknya, industri ini memerlukan tenaga yang berkualitas lebih tinggi. Bahasa Inggris serta bahasa asing lainnya yang bagus merupakan syarat pertama, kemudian untuk pekerjaan yang terendah seperti kantor belakang dan *call center*, kemampuan komputer dasar, juga merupakan syarat mutlak. Untuk pekerjaan yang lebih tinggi, berbagai keahlian tingkat sarjana atau lebih, seperti akuntansi, informatika, dokter dari berbagai spesialisasi, sarjana teknik dari berbagai program studi, juga menjadi syarat. Dengan demikian, lokasinya menjadi berbeda dari lokasi PKIB pada tahap pertama. Jika lokasi PKIB pada

tahap pertama memilih wilayah-wilayah yang dekat dengan pelabuhan atau wilayah-wilayah metropolitan dan sekitarnya, maka PKIB pada tahap kedua kemungkinan besar memilih wilayah sekitar kota pendidikan tinggi yang bermutu, yang beriklim baik, akan tetapi tetap mempunyai prasarana listrik, air dan sebagainya yang bagus, dengan kota yang ditata rapi.

Pertanyaan sekarang sampai dimana Indonesia dapat memanfaatkan PKIB bagi pengembangan wilayah ini. Pada saat ini, kelihatannya masih jauh. PKIB pada tahap awal saja, yang telah susah payah dikejar dan dengan mengorbankan kepentingan lain pada masa Orde Baru, sekarang sudah mulai terlantar. Investor sudah mulai banyak yang lari dari Indonesia. Pulau Batam sebagai bagian dari Sijori pun, yang dulu berkembang dengan pesat, sekarang baru akan ditata kembali.

Sebetulnya Indonesia dapat meloncat dengan mengambil langsung kesempatan untuk PKIB tahap selanjutnya. Akan tetapi, untuk itu pemerintah Pusat harus mempunyai tekad yang kuat untuk menata prasarana telekomunikasinya. Pada saat ini, tarif telepon Indonesia adalah salah satu yang termahal di dunia. Demikian juga dengan sendirinya tarif internet. Juga internet di Indonesia sangat lambat. Tanpa perbaikan pada kedua hal tersebut, mustahil Indonesia dapat "menangkap" industri PKIB tahap selanjutnya ini. Walaupun benar, bahwa PKIB adalah sistem dari modal itu sendiri, akan tetapi pengalaman empiris dari negara-negara lain, PKIB dapat "ditangkap" dengan insentif dari pemerintah setempat. Pemerintah harus jeli melihat, bahwa banyak sarjana Indonesia yang berkualifikasi tinggi. . Demikian juga tamatan Sekolah Lanjutan Atas atau Diploma yang dapat bekerja di kantor belakang dan *call center*, di Indonesia melimpah. Tinggal mereka dilatih dengan latihan yang keras dalam bahasa Inggris serta kemampuan komputer dan diberi mental melayani yang baik, maka mereka merupakan tenaga kerja yang potensial.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

- Breathnach, Proinnias, 2006. *Dublin Calling: Globalization of A Metropolis on the European Periphery*, Departement of Geogrpahy, National University of Ireland, Maynooth County, Kildare, Ireland., [www.geog.ubc.ca/iiccg/papers/Breathnach.p.html](http://www.geog.ubc.ca/iiccg/papers/Breathnach.p.html), akses 2006
- Friedman, Thomas L. 2006. *the World is Flat, The Globalized World in the Tweenty First Century*, Penguin Books , London, England
- Fuchs, Roland J. and Pernia, Ernesto M. (1987), *External Economic Forces and National Spatial Development: Japanese Direct Investment in Pacific Asia*, in R.J. Fuchs, G.W. Jones, and E.M. Pernia, *Urbanization and Urban Policies*, Westview Press, Boulder

- Heron, Tony, 2004. Globalization, Regionalization and Development: The Political Economy of North American Apparel Industry, *IPEG Papers in Global Political Economy no. 11*, May 2004, University of Sheffield, England.
- Lee Tsao Yuan, 1991. *Growth Triangle, The Johor-Singapore-Riau Experience*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore
- Muladi, Adrinof A. Chaniago, Abdel Gafur, John D. Pattihahusa, (2003), *Kawasan Batam pada Era Otonomi Daerah dan Perdagangan Bebas*, Tim Peneliti Habibie Center Jakarta, 26 Agustus 2003,
- Ohmae, Kenichi, 1995. *The End of the Nation State, the Rise of Regional Economies*, The Free Press.
- Wang, Vincent Wei-cheng, 1999. *Whither (or whiter?) The Development State ? Globalization and the Asian Crisis*, Departement of Political Science, University of Richmond, Richmond. V.A.
- Majalah Tempo 2006, *Baru Akan Bertanya ke Singapura*, Majalah Tempo, edisi 24-30 Juli 2006.
- \_\_\_\_\_, (2006, *Satu Kapal Dua Nakhoda*, edisi 24-30 Juli 2006.
- \_\_\_\_\_, 2006. *Mari Elka Pangestu: Di Batam Kita Tidak Konsisten*, 24-30 Juli 2006.
- \_\_\_\_\_, 2006. *Berkah Ramuan Mujaran Deng*, edisi 24-30 Juli 2006.
- Harian Kompas 2006. *Kerjasama akan Dikonkretkan, PM Lee: Singapura akan Memberi Masukan dan Nasihat*, 16 Juli 2006, hal. 1 dan 15, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2006. *Singapura Ragukan kEKI, Penyelesaian Perizinan di Pusat akan Berkurang Menjadi 59 Hari*, Harian Kompas, 16 Juni 2006.
- \_\_\_\_\_, 2006. *Teknologi Informasi: Pengguna Internet di Cina Melonjak Drastis*, Harian Kompas Selasa, 1 Agustus 2006, hal. 14.